

EFEKTIFITAS METODE PRA (PARTICIPATION RURAL APPRAISAL) DALAM PENGENTASAN KELUARGA MISKIN DI PROPINSI LAMPUNG

(The Effectiveness PRA Model for Poverty Alleviation in Lampung)

Elly K.T.P

ABSTRACT

The monetary crisis that began in 1998, followed by multidimensional one, had induced a widespread impacts on many aspects of the national political, economical, social and cultural lives. This condition is strongly related to the unsound strategy of development implemented by the previous government with its centralized, beurocratic and uniformity approach which in turn had the effect of social structure and organization deempowerment of the society. This can be cured by revitalizing self-determination dan social participation of the community to help themselves solving their own problems without government interference. PRA (Participation Rural Appraisal) method could be considered applied to raise etno development with its bottom-up approach in community development. This research is conducted to asses the effectiveness of PRA in empowering the poor in province Lampung. A quasi-experimental method is adopted with single before-after design. Research results revealed that PRA method is not effective enough to increase social participation of the people in Lampung due to unnecessary intervention from the local authority so as to make them unable in making their own decision. In addition, social workers in the location were not functioning well due to lack of capability in applying PRA method, and there were weak partnerships between NGO and local entrepreneur, along with community, to overcome poverty problems. In the future, training on PRA method should be held for local social worker. In addition, there should be effort to grow local social-structure initiatives and creativities without the inference from local government.

Key words: PRA (Participation Rural Appraisal), poor empowerment, effectiveness.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter dan ekonomi yang mulai berlangsung sekitar pertengahan tahun 1997 dan berdampak luas di semua bidang pembangunan Kondisi ini merupakan perpaduan beragam

terjadinya krisis. Situasi demikian sebagai akibat terjadinya kelemahan, terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial. Kenyataan tersebut memicu kondisi nasional yang selama ini menjadi potensi tumbuh kembangnya permasalahan kemiskinan di Indonesia dewasa ini. Berdasarkan hasil pendataan Badan Kesejahteraan Sosial

Nasional pada tahun 2000 jumlah Keluarga miskin di Indonesia 2.794.107 KK (Kesejahteraan Sosial Dalam Angka, 2000: 8). Pembengkakan angka kemiskinan ini dipicu oleh banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya akan menambah angka pengangguran dan memicu timbulnya keluarga-keluarga miskin baru. Jika masalah pengangguran dan masalah kebangkrutan industri sebagai akibat krisis ekonomi dianggap dapat dipecahkan melalui pertumbuhan ekonomi positif, maka kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dikhawatirkan tidak akan otomatis teratasi.

Penelitian evaluatif, oleh tim peneliti dari B2P3KS Yogyakarta, tentang pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam penyantunan dan pengentasan fakir miskin di Kabupaten Magelang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengungkap bahwa perhatian para warga binaan pada pelaksanaan PBS belum sesuai dengan harapan. Kegiatan kelompok warga binaan lebih mengacu pada kerjasama beternak sapi, belum mengarah pada kegiatan pengembangan usaha kesejahteraan sosial dan menjadi sebuah organisasi sosial atau koperasi. Pemahaman tersebut ternyata belum tumbuh dalam kehidupan masyarakat, karena muatan untuk menumbuh kembangkan masyarakat agar mandiri di masyarakat belum memadai (Wardhana, 1995: 57).

Hasil penelitian tersebut menandakan perlunya penelitian efektivitas metode PRA dalam pengentasan keluarga miskin berbasis masyarakat, sebab pelaksanaan pengentasan keluarga miskin pada umumnya menggunakan sistem proyek.

Perencanaan proyek berasal dari atas (*top-down planning*), sehingga banyak proyek pengentasan keluarga miskin kurang berhasil sebab tidak sesuai dengan kebutuhan warga miskin itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tingkat efektivitas metode PRA yang sudah diaplikasikan dalam penanganan keluarga miskin berbasis masyarakat di Propinsi Lampung.

1. Masalah Penelitian

Apakah metode PRA efektif mampu memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif serta memiliki kepedulian terhadap pengentasan keluarga miskin di Propinsi Lampung.

2. Tujuan Penelitian

Mengkaji dan mengevaluasi apakah metode PRA efektif mampu memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif mengentaskan keluarga miskin di Propinsi Lampung.

3. Manfaat Penelitian

- a. Diperolehnya strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif mampu menumbuhkan partisipasi sosial, agar masyarakat memiliki kepedulian aktif dalam mengentaskan keluarga miskin di lingkungannya.
- b. Memberikan masukan pada instansi yang berwenang agar secara integratif dan koordinatif melaksanakan pemberdayaan masyarakat, agar tercipta kemandirian masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di lingkungannya serta mengurangi ketergantungannya pada bantuan pemerintah.

B. Kajian Pustaka

1. Aplikasi Metode PRA (Participation Rural Appraisal) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan unit-unit, baik itu merupakan satuan komunitas maupun sistem sosial dalam bentuk perangkat pranata sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu lebih dari seperempat abad. Nampaknya tidak mampu menghilangkan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau menurut istilah pemerintah mereka termasuk dalam kelompok keluarga pra sejahtera. bahkan selama terjadi krisis ekonomi berlanjut menjadi krisis yang multidimensional, jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi semakin banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan sangat boleh jadi karena strategi pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah pada masa yang lampau adalah yang bersifat sentralistik birokratik dan seragam seluruh Indonesia. Akibat pola pembangunan yang demikian, maka masyarakat mengalami *de empowerment* pranata sosial dan organisasi sosial yang selama ini merupakan tiang utama kehidupan masyarakat. Proses pemudaran pranata sosial melalui berbagai intervensi birokrasi telah menghancurkan tatanan masyarakat yang kehilangan kemampuannya untuk mandiri.

Kenyataan secara empirik mengindikasikan bahwa memberdayakan masyarakat tidak hanya melalui program sektoral yang bersifat tambal

sulam, sebab harus diingat bahwa masyarakat Indonesia bukanlah suatu bentuk satuan sosial yang seragam, tetapi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam etnis dan budaya sehingga penyeragaman pengembangan satuan sosial tersebut menumbuhkan konflik dan ketergantungan sosial. Agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi, maka peran negara maupun pemerintah harus dikurangi kemudian peran masyarakat ditingkatkan (Sardjono Yatiman, 2000,60).

Sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga itu sendiri oleh sebab itu perlu kiranya pengembangan paradigma baru diarahkan untuk mencapai sasaran pengembangan sumber daya manusia dengan berpusat pada pengembangan manusia (*Human development*). Untuk mencapai kesejahteraan sosial, artinya pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) tetapi lebih pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktivitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif bernilai tambah tinggi untuk mencapai sasaran itu paradigma pembangunan yang selama ini bersifat *planned development* perlu dirubah menjadi *etno development* (Sorajec, 1991, xviii). *Etno development* menekankan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan pengembangan kemampuan dan potensi masyarakat sendiri perubahan itu menuntut pembangunan: 1) Berbasis pada kekuatan komunitas yang bersifat *bottom up* dari pada *top down*. 2) Pembangunan tidak hanya berpusat pada birokrasi dari penguasa yang cenderung kurang demokratis tetapi

berpusat pada kekuatan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis. 3) Pembangunan tidak lagi memihak pada kepentingan penguasa dan penguasa yang hanya dinikmati sekelompok orang, tetapi memihak pada kepentingan orang banyak terutama bagi warga miskin dan si lemah pembangunan lebih mengutamakan keadilan dan pemerataan.

Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah meningkatkan serta memperluas kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang berbasis komunitas (*community enterpresis*) selama ini *community enterprises* telah menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat serta memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan komunitas (berbasiskan masyarakat _), metode yang dipergunakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat adalah PRA (*Participation Rural Appraisal*). Metode ini memanfaatkan kesetiakawanan sosial dan kohesivitas kelompok. Solidaritas dan kesetiakawanan sesungguhnya bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. metode tersebut memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dalam masyarakat. Mereka didorong agar menjadi lebih kohesif terhadap kelompok sehingga dapat bersama-sama mencapai kemajuan dan kemandirian. Kohesivitas terhadap kelompok adalah suatu keadaan kelompok yang sudah membentuk kohesi, yang ditandai dengan kapasitas kelompok itu untuk mempertahankan keanggotaan para anggotanya sehingga dapat bekerja sama dengan kompak dalam mencapai tujuan bersama (Johnson and Johnson dalam Martono dan Neila Ramdhani, 1996).

Program pemberdayaan masyarakat yang mengaplikasikan metode PRA dilaksanakan dalam

kelompok-kelompok kecil sesungguhnya memanfaatkan sifat hidup masyarakat seperti ini. Solidaritas dan kesetiakawanan yang sudah dimiliki masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dibina, dibangun dan dikembangkan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun yang dimaksud dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ini adalah suatu kesatuan anggota dan persatuan para anggota, KSM merupakan milik anggota dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama dari para anggota dan mengembangkan usaha-usaha bersama dari masing-masing anggotanya. bahwa penyelesaian tugas dalam kelompok yang berkohefif lebih efektif, apalagi bila disertai dengan adanya kompetisi yang sehat. Selanjutnya menurut Gerald Euster, dalam buku *Contemporary Social Work, an Introduction to social work and social welfare*) menyebutkan bahwa pembentukan kelompok dimaksudkan untuk mengembangkan sikap keterbukaan, serta menciptakan kerjasama, melalui kelompok seseorang akan meningkatkan ketrampilan untuk menerima dan memberi (Euster, 1975: 220-221). Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) adalah sebagai sarana menekankan pentingnya partisipasi setiap anggota kelompok dalam pemecahan suatu masalah yang dihadapi oleh kelompok. Terdapat lima kriteria dalam kelompok swadaya yaitu: 1) Tanggung jawab 2) Standar 3) Pengakuan 4) Kepemimpinan yang bersal dari kelompok 5) Kegiatan kemasyarakatan (Soetarso, 1986,5)

Dasar-dasar pengetahuan tentang proses perkembangan kelompok berasal dari sosiologi kelompok kecil, psikologi sosial, psikoterapi kelompok, hubungan antar manusia dari pekerja sosial.

Menurut Henry Maier dalam Soetarso MSW menyarankan bahwa semua kelompok kecil berkembang melalui empat tahap, yaitu: 1) Tahap pemitraan kesamaan 2) Tahap penciptaan saling hubungan 3) Tahap pengembangan identifikasi timbal balik 4) Tahap pengembangan identifikasi kelompok. Proses bimbingan sosial masyarakat mengandung dua unsur pokok yaitu perencanaan dan pengintegrasian masyarakat keduanya merupakan proses yang berlangsung di dalam masyarakat yang dapat memperlancar beberapa faktor sbb: 1) Penumbuhan kesadaran akan loyalitas kepada masyarakat di mana perorangan. 2) Peningkatan perasaan tanggungjawab terhadap kondisi serta kedudukan masyarakat. 3) Permunculan sikap-sikap yang memungkinkan kerja sama dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan dalam berbagai seginya. 4) Pertumbuhan nilai-nilai yang sama di dalam masyarakat secara keseluruhan. (Soetarso, 1994: 39)

2. Strategi Metode PRA (*Participation Rural Appraisal*)

Adapun strategi bimbingan sosial masyarakat berdasarkan atas prinsip pemberdayaan terdiri dari beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah: 1) Mengidentifikasi, menamai masalah dan isu-isu. 2) Menganalisis masalah dan mengidentifikasi pelaku (analisis masalah). 3) Mengidentifikasi tujuan umum dan khusus. 4) Menyiapkan rencana tindakan yang secara rinci berisi taktik, program, tugas dan proses mencapai tindakan. 5) Melaksanakan rencana tindakan. 6) Mengevaluasi seluruh proses dan rencana tindakan dalam rangka membandingkan hasil yang ditetapkan dan hasil yang nyata.

7) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian. (Kenny, 1994: 13-115.)

Dalam pengembangan masyarakat (*Community Development*) dikembangkan beberapa metode diantaranya adalah PRA. Metode tersebut merupakan program pengembangan masyarakat yang bersifat dua arah, dalam melakukan kajian perlu kiranya pekerja sosial memahami kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. PRA dimaksudkan untuk mengembangkan masyarakat dengan cita-cita dasar bahwa kegiatan pembangunan dikembangkan dan dimiliki oleh masyarakat sendiri oleh masyarakat. Dalam arti program bukan dirancang oleh orang luar, kemudian masyarakat diminta ikut melaksanakan, tetapi program di rancang oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh orang luar. Dengan pemikiran ini, aktivis pembangunan selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (Chambers, 1996: 41) PRA ini perlu menjadi metode teknik dalam pemberdayaan masyarakat, sebab selama ini program pembangunan masyarakat lebih banyak direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga yang menjadi sasaran. Program yang demikian diturunkan " dari atas kebawah " (*Top Down*) artinya diturunkan dari pemimpin lembaga kepada pelaksana PRA adalah salah satu metode pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pengembangan program pembangunan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai Pelaku Aktif (subyek) pembangunan yaitu sebagai "peneliti yang mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi warga", perencana dan

pelaksana pembangunannya serta mampu melaksanakan pengendalian program.

Adapun prinsip-prinsip PRA yaitu:

- 1) Prinsip mengutamakan yang terabaikan.
- 2) Prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 3) Prinsip saling belajar menghargai perbedaan.
- 4) Prinsip Santai dan informal.
- 5) Prinsip Triangulasi.
- 6) Prinsip Mengoptimalkan Hasil.
- 7) Prinsip Orientasi Praktis.
- 8) Prinsip Keberlanjutan dan Selang Waktu.
- 9) Prinsip Belajar Dari Kesalahan
- 10) Prinsip Terbuka.

Sedangkan program yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Penjajagan/Pengenalan.

Kebutuhan. Pengenalan kebutuhan seringkali disebut pengenalan masalah karena biasanya masyarakat memiliki masalah-masalah yang menimbulkan kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk mengatasi masalah yang mengganggu kesejahteraan hidup mereka. Pengkajian masalah ini disertai dengan pengenalan potensi masyarakat, terutama bila program yang dikembangkan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keswadayaan masyarakat. Pada tahap awal ini yang biasa dikaji adalah informasi yang mengungkapkan keberadaan lingkungan dan masyarakatnya secara umum, serta melaksanakan analisis atas keadaan masyarakat itu.

- 2) Perencanaan Kegiatan.

Perencanaan kegiatan merupakan lanjutan proses diatas. Rencana itu perlu mencantumkan dengan jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Makin

kongkrit dan jelas terencana yang dihasilkan, makin besar kemungkinan bahwa rencana itu sungguh-sungguh akan dilakukan. Dengan metode PRA penyusunan rencana kegiatan untuk program desa, dilakukan berdasarkan hasil keputusan masyarakat sendiri melalui forum diskusi. Hendaknya

diskusi tersebut dilakukan di dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat yang cukup mewakili kepentingan umum.

- 3) Pelaksanaan/Pengorganisasian dan Implementasi Program.

Betapapun baiknya suatu rencana kegiatan, rencana itu baru akan bermakna jika sungguh-sungguh dilakukan untuk melaksanakan kegiatan, perlu diatur penjadwalan kegiatan, termasuk pembagian kelompok dan tugas-tugas. Sesuai dengan prinsip-prinsip metode PRA, pelaksanaan kegiatan ini sebaiknya diorganisir dan dipimpin oleh anggota masyarakat sendiri, sedangkan petugas lembaga program hanya mendampingi.

- 4) Pemantauan Kegiatan (Monitoring).

Semua kegiatan yang kemudian dilaksanakan perlu dipantau atau diawasi secara berlanjut untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Jika menyimpang tentu perlu diusahakan tindakan-tindakan perbaikan agar dapat meluruskannya kembali. Petugas lembaga program, memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemantauan kegiatan mereka sendiri.

- 5) Evaluasi Kegiatan.

Setelah suatu tahapan kerja selesai, maka hasilnya layak untuk

dievaluasi atau dinilai sejauh mana telah mencapai tujuan program yang telah disepakati bersama masyarakat. Biasanya terdapat dua macam evaluasi program yaitu a). Evaluasi setelah melihat adanya perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dengan adanya kegiatan bersama (program). Biasanya dilakukan setelah sesuatu jangka waktu tertentu (misalnya per tahun) b) Evaluasi akhir program dilakukan antara lain untuk: mengkaji tujuan program apa saja yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai, serta mengapa terjadi demikian,, mengkaji pengaruh program terhadap kesejahteraan masyarakat (disebut studi dampak). Pertanggungjawaban lembaga pendamping program, biasanya juga keperluan laporan kepada lembaga donor. Evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sendiri yang merasakan manfaat dan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan. Akan lebih baik apabila penyusunan laporan juga melibatkan masyarakat. (Mulyono dkk., 1996: 21-31)

Melalui aplikasi metode PRA diharapkan mendorong masyarakat termotivasi mampu mengatasi masalahnya sendiri. Adapun yang dimaksud motivasi adalah suatu alasan/dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu melakukan tindakan maupun bersikap tertentu. Diharapkan dengan mengaplikasikan metode PRA tersebut makin meningkat pula partisipasi warga masyarakat setempat mampu membantu keluarga miskin di lingkungannya. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *Participation* yang artinya pengikutsertaan (Shadilly,

1987). Istilah partisipasi sendiri dapat dilihat dari beberapa sisi, karena partisipasi merupakan konsep yang mengandung banyak variasi, pemahaman tergantung dari disiplin ilmu apa yang ingin dilihat. Dalam perspektif ilmu sosial, partisipasi dapat ditinjau dari disiplin ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi. Menurut Mantra (1984), partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat adalah keadaan yang masing-masing individu.

C. Hipotesis Penelitian

- a) Mengidentifikasi masalah serta potensi kesejahteraan sosial meliputi penajagan kebutuhan.
 1. Menyusun program perencanaan kegiatan dengan mengkaji potensi dan alternatif kegiatan.
 2. Melaksanakan program pengentasan keluarga miskin dengan berdasarkan pelaksanaan agar terpenuhinya kebutuhan
 3. Mengendalikan pelaksanaan program pengentasan keluarga miskin.
 4. Melaksanakan evaluasi program pengentasan keluarga miskin.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kal. Jagabaya II Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini unit analisisnya adalah anggota dan pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian evaluasi kebijakan *single before after* yang berguna untuk memperbaiki program serta mengetahui seberapa besar efektivitas program kelompok swadaya masyarakat terhadap peningkatan partisipasi sosial masyarakat dalam pengentasan keluarga

miskin (Finsterbusch dan Hotz, 1980: 140-141).

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu telaah ilmiah *quasi eksperimental* yang bertujuan menjelaskan lingkungan dengan uji komparasi antar variabel diantara peubah (variabel) melalui pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengungkap relasi dan interaksi antara peubah dari pendekatan sosiologis maupun psikologis dalam struktur riil. Penelitian ini dilaksanakan di daerah yang sebagian besar penduduknya tidak mampu secara ekonomi, kesehatan, psikis, sosial, dan kultural. Sampel sebesar 40 orang terdiri dari 10 orang para tokoh masyarakat dan 30 orang warga miskin dari Kalurahan Jagabaya II termasuk dalam kelompok uji coba.

II. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penekanan pendekatan yang sentralistik di semua bidang pembangunan semakin memperparah keadaan, sebab masyarakat semakin kehilangan daya responsivitas atau kreativitasnya dalam menghadapi perubahan dan permasalahan yang semakin kompleks, serta semakin besarnya akumulasi frustrasi berbagai unsur masyarakat, kemudian di lain pihak pendekatan sentralistik semakin menampakkan ketidakberdayaannya. Kenyataan tersebut memicu terjadinya kondisi meningkatnya permasalahan sosial di daerah di Propinsi Lampung termasuk Kalurahan Jagabaya II daerah lokasi obyek penelitian, hal ini dapat diketahui dari mata pencaharian terbesar dari penduduk Jagabaya II adalah sektor informal (55,97%),

sedangkan di sektor swasta (34,75%), Pegawai negeri dan ABRI (7,88%). Sektor pertanian hanya ditekuni oleh 44 jiwa (0,33%) dengan luas lahan pertanian yang relatif sempit 23,2 ha. Jika dirata-rata setiap kepala keluarga hanya mengerjakan kurang lebih 0,5 Ha.

Adapun untuk mencukupi kebutuhan kalanganarganya terpaksa harus mendatangkan bahan pangan dari luar daerah. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dari kalangan tokoh masyarakat agar dapat membawa warganya ke arah kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, tidak menggantung pada pihak lain dengan melalui penciptaan lapangan kerja. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Jagabaya II memiliki angka partisipasi sekolah yang rendah. Hal ini didasarkan pada tingginya penduduk yang bersekolah hanya sampai Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) sebanyak 5221 (47,51%) kemudian tingkat SD 3032 jiwa (27,59%) sedangkan Taman Kanak-kanak 989 (9%).

Dari angka di atas menunjukkan bahwa 924 jiwa (84,10%) penduduk Kalurahan Jagabaya II memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga tingkat akademi sampai tingkat sarjana hanya sebanyak 542 jiwa (4,95%) sedangkan untuk tingkat SLTA hanya 1204 jiwa (10,95%). Apabila dikaji lebih lanjut, kondisi rendahnya tingkat pendidikan di daerah Kalurahan Jagabaya II Apabila dikaitkan dengan sempitnya lahan pertanian, maka kebanyakan penduduk bekerja di sektor informal.

2. Identitas Responden

Dari hasil penelitian diketahui dari 40 orang responden yang terdiri dari 10 orang tokoh masyarakat dan 30 orang keluarga miskin, diindikasikan bahwa 24 orang 80% adalah wanita dan 6 orang 20% pria. Selanjutnya dari 10 orang responden tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 8 orang (80%) pria kemudian 2 orang (20%). Dari hasil penelitian diketahui ditinjau dari pendidikan responden 3 orang keluarga miskin 6 orang (20%), buta huruf, kemudian 10 orang (33%) berpendidikan SD, 10 orang (33%) berpendidikan SLTP, 3 orang (10%).

Dari data hasil penelitian tersebut tampak bahwa pendidikan responden termasuk kategori rendah, kondisi tersebut rentan terhadap masalah ekonomi dewasa ini, dengan adanya krisis yang multidimensional saat ini. Pendidikan tokoh masyarakat 4 orang (40%) SLTP, kemudian 4 orang (40%) SLTA, sedangkan 1 orang (10%) Sarjana Muda. Dari data tersebut diketahui bahwa ternyata pendidikan para tokoh masyarakat di Kalurahan Jagabaya II cukup tinggi, kondisi demikian memungkinkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan kemampuan dan potensi masyarakat sendiri. Status pendidikan yang memadai memungkinkan pembangunan tidak hanya berpusat pada birokrasi dari penguasa yang cenderung kurang demokratis, tetapi berpusat pada kedaulatan rakyat yang lebih demokratis.

Umur responden keluarga miskin di Kalurahan Jagabaya II, Kota Bandar Lampung yang berumur 17-25 tahun 1 orang (3%), 26-34 tahun 6 orang (20%), 35-43 tahun 8 orang (27%), 44-52 tahun

8 orang (27%). Selanjutnya 7 orang (23%) lebih dari 52 tahun. Dari data di atas terungkap 77% responden berada pada usia produktif. Apabila dilihat kondisi umur maka para responden tersebut masih dapat ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya agar lebih berkreativitas dimobilisasi dalam pelaksanaan *etno development*. Kondisi tersebut didukung pula oleh motivasi berpartisipasi dari para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok swadaya Masyarakat (KSM).

Apabila dilihat dari umur para tokoh tersebut menurut data hasil penelitian menunjukkan umur 17-25 tahun 1 orang (10%) sedangkan umur 35-45 tahun 1 orang (10%), umur 44-52 tahun 4 orang (40%) data tersebut di atas menunjukkan 60% dari responden yang berusia antara 17-52 tahun. Ditinjau dari umur para tokoh masyarakat tersebut mereka diharapkan akan mampu berpartisipasi aktif dalam bentuk buah pikiran yaitu pemberian sumbangan yang berupa ide, pendapat atau buah pikiran yang mendukung baik untuk menyusun program maupun memperlancar program.

Apabila ditinjau dari kondisi ekonomi data hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan responden keluarga miskin Rp 100.000-200.000, per bulan 16 orang (53%), Rp. 201.000-300.000 per bulan 11 orang (37%) kemudian lebih dari Rp. 400.000 per bulan 5 orang (10%). Penghasilan 90% responden termasuk rendah. Oleh sebab itu penyediaan modal, prasarana, serta pemberian ketrampilan merupakan faktor yang paling menentukan terentaskannya keluarga miskin di lokasi penelitian. Dari hasil penelitian terungkap 2 orang (7%) bekerja di sektor swasta sebagai pegawai, kemudian yang bekerja sebagai pedagang kecil 19 orang

(63%) 9 orang (30%) sebagai buruh. Sebagian responden keluarga miskin bekeja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kemudian memiliki tanggungan keluarga 1-3 orang 8 orang (27%), kemudian 4-6 orang, 11 orang (37%), lebih dari 6 orang 11 orang (37%). Dari data tersebut terungkap bahwa sebagian besar responden 74% memiliki tanggungan antara 4 orang sampai lebih dari 6 orang, dari data tersebut menunjukkan bahwa para keluarga miskin memiliki beban tanggungan keluarga yang cukup besar. Sehingga mereka tidak mampu menikmati kehidupan yang layak.

Tokoh masyarakat 3 orang (30%) berpenghasilan kurang dari Rp 500.000, kemudian 3 orang (30%) berpenghasilan Rp 500.000 sampai 1 juta, 4 orang (40%) berpenghasilan 1 juta - 1,5 juta. Dari data di atas bahwa tokoh masyarakat di Kalurahan Jagabaya II, termasuk berpenghasilan menengah, sehingga kemampuan dibidang ekonomi masih belum memadai, di samping itu jika ditinjau pekerjaan mereka yang sebagai pegawai negeri/ABRI 3 orang (30%) kemudian 2 orang (20%) sebagai pensiunan dan pegawai negeri/ABRI. Selanjutnya 6 orang (60%) sebagai pedagang dan wiraswasta. Apabila dilihat dari pekerjaannya maka tokoh masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, 5 orang (50%) sebagai pegawai negeri/ABRI. Keberadaan pegawai negeri/ABRI sebagai tokoh masyarakat menunjukkan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial. Sebab kebanyakan mereka yang berprofesi disektor swasta belum berpartisipasi secara aktif ikut serta mengentaskan keluarga miskin di Kalurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukarame. Kondisi ini terjadi karena kurangnya penyesuaian

petugas dari instansi sosial, menyebabkan kurangnya tanggapan antusias dari masyarakat setempat.

Variabel penelitian meliputi beberapa bentuk kegiatan aplikasi dari metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat setempat, sebagai realisasi mobilisasi potensi warga masyarakat. Adapun tahapan kegiatan, dimulai tahap perencanaan, sampai dengan evaluasi menjadi tanggung jawab masyarakat setempat. Dalam upaya memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dikembangkan strategi serta konsep kerja pengembangan masyarakat (*Community Development*) sebagai dasar orientasi arah, serta upaya pengentasan keluarga miskin.

Sebagai upaya untuk mengetahui berhasil tidaknya metode PRA bagi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan keluarga miskin, maka dilaksanakan ujicoba pengentasan keluarga miskin berbasis masyarakat sebagai lokasi uji coba adalah Kalurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame Propinsi Lampung. Tahap pertama yang dilaksanakan adalah Pembentukan Kelompok kerja Swadaya Masyarakat Kesadaran dan kemauan yang tumbuh lebih lanjut memotivasi para warga dan tokoh masyarakat untuk membentuk kelompok kerja swadaya masyarakat. Dari data penelitian diperoleh hasil pembentukan kelompok swadaya masyarakat di Kalurahan Jagabaya II sudah berjalan sesuai dengan harapan, terbukti dari prosentase tertinggi 17,5 (7 orang) tokoh masyarakat serta 32,5% (13 orang) keluarga miskin selaku warga masyarakat menyatakan kelompok swadaya masyarakat di Kalurahan Jogoboyo II Kec. Sukarame sudah terbentuk. Kondisi tersebut

mencerminkan adanya kemauan yang kuat dari seluruh komponen warga untuk memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, dengan cara memberdayakan pranata yang ada di dalam kehidupan masyarakat membangun lembaga sosial melalui pengintegrasian lembaga yang ada, juga upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Terbentuknya kelompok tersebut memungkinkan terealisasinya pengentasan keluarga miskin yang menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat yang biasanya disebut berbasis masyarakat. Sebab semua komponen unsur dalam masyarakat ikut terlibat hal ini terbukti dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 orang (50%) dari keseluruhan responden yang berjumlah 40 orang. Selanjutnya 16 orang (80%) dari keluarga miskin juga para tokoh masyarakat/tokoh adat termasuk petugas pemerintah dalam kegiatan kelompok cukup memadai. Walaupun terdapat 4 orang (40%) dari keluarga miskin yang menyatakan, bahwa para penguasa setempat (lurah, camat) memiliki kontribusi yang tinggi dalam pembentukan kelompok tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan walaupun partisipasi para tokoh masyarakat maupun warganya cukup tinggi tetapi karena kualitas tokoh masyarakat maupun keluarga miskin yang menjadi binaan masih rendah, akhirnya mereka kurang mampu mengidentifikasi permasalahan sosial yang dihadapi. Lebih lanjut dapat diindikasikan bahwa masih tingginya dominasi perangkat pemerintah, dalam pelaksanaan setiap program pengentasan keluarga miskin.

Data penelitian mengungkapkan tingginya motivasi para tokoh masyarakat menjadi kader dengan

alasan diketahui bahwa prosentase tertinggi menyatakan positif 9 orang (80%) motivasi tokoh aktif dalam kegiatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), karena berdasarkan tuntunan agama, saya harus menolong keluarga miskin. Selanjutnya 8 orang (80%) menyatakan bahwa melalui kegiatan para tokoh masyarakat merasa memperoleh banyak informasi sedangkan 3 orang (30%) melalui kegiatan KSM tersebut diperoleh wawasan yang luas.

Dari pendapat tokoh masyarakat tersebut tampak bahwa antusiasme para tokoh masyarakat cukup tinggi, tetapi karena kemampuan menyampaikan pendapat serta lambatnya memperoleh inovasi, maka kreativitas dan motivasi berpartisipasi dalam menangani masalah sosial masih rendah.

3. Efektifitas Metode PRA (*Participation Rural Appraisal*) bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengentasan Keluarga Miskin di Kal. Jagabaya II, Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung

Kenyataan secara empirik mengindikasikan bahwa untuk memberdayakan masyarakat tidak hanya melalui program sektoral yang bersifat tambal sulam. Berdasarkan etnos development menekankan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan pengembangan kemampuan dan potensi masyarakat sendiri. Perubahan itu menuntut pembangunan yang bersifat top down oleh sebab itu melalui penelitian ini diharapkan masukan seberapa besar keterlibatan warga masyarakat untuk ikut aktif menangani permasalahan sosial, kondisi tersebut dapat tercapai pada pemahaman dan kemampuan serta pengetahuan para

tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat. pada kegiatan *community development* dengan pemberian ketrampilan

Mengaplikasi-kan metode PRA (*Participation Rural Appraisal*) meliputi kegiatan sbb :1) Mengidentifikasi

Tabel 1.

Hasil perhitungan uji-t (t-test) terhadap empat pasang variabel bebas sebelum dan sesudah perlakuan

No	Pasangan-variabel	Rata-rata		Tingkat signifikansi
		Sebelum	Sesudah	
1	Identifikasi masalah	43,50	46,17	0,000
2	Penyusunan rencana	54,50	60,13	0,000
3	Implementasi program	27,87	32,70	0,000
4	Pengendalian dan evaluasi	60,80	67,27	0,000

masalah dan potensi kesejahteraan sosial 2) Menyusun program pengentasan keluarga miskin 3) Melaksanakan program pengentasan keluarga miskin 4) Mengendalikan pelaksanaan program pengentasan keluarga miskin.

Pengetahuan dan kemampuan masing-masing anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Jagabaya II dalam upaya pengentasan keluarga miskin antara sebelum dan sesudah perlakuan seperti yang tercermin pada nilai-nilai dalam Tabel 1. Lebih lanjut akan dianalisis untuk mengungkap keberadaan beserta dinamika perbedaan yang mewarnainya.

Dari hasil penghitungan uji-t (*t-test*) terhadap empat pasang variabel bebas antara hasil pendataan awal dengan pendataan akhir mendasari penarikan

kesimpulan sementara yaitu adanya perbedaan pengetahuan dan kemampuan di kalangan tokoh masyarakat warga Kelurahan Jagabaya II antara sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil perhitungan uji-t menunjukkan perbedaan kondisi tingkat pengetahuan dan kemampuan di kalangan tokoh masyarakat dan warga miskin di Kelurahan Jagabaya II antara sebelum dengan sesudah perlakuan terutama dalam melaksanakan identifikasi masalah dan potensi kesejahteraan sosial serta menyusun, melaksanakan serta mengendalikan program pengentasan keluarga miskin. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah

Pengetahuan serta kemampuan tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kelurahan Jagabaya II dalam

mengidentifikasi masalah dan potensi kesejahteraan sosial pada saat sebelum perlakuan menunjukkan nilai 43,50 meningkat menjadi 46,17 setelah perlakuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial yang dilaksanakan cukup efektif. Namun kemampuan tokoh masyarakat mengidentifikasi masalah sosial yang meliputi, kegiatan proses penjajagan, pengenalan kebutuhan masih belum maksimal, hal ini terjadi karena masyarakat percaya dirinya masih rendah, sehingga banyak campur tangan dari pejabat setempat sehingga para anggota masyarakat hanya menuruti kehendak pejabat, bukan atas dasar potensi murni swadaya masyarakat, padahal kemampuan melakukan identifikasi masalah, akan memudahkan penyandang masalah menemukan masalah yang sebenarnya (akar masalah) yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat di daerah lokasi penelitian yaitu Kelurahan Jagabaya II. Kondisi tersebut terjadi karena sifat pembangunan sentralistik pada masa yang lalu, berakibat kreativitas warga sangat rendah

b. Perencanaan kegiatan dan penyusunan program pengentasan keluarga miskin

Pengetahuan dan kemampuan tokoh masyarakat warga Kelurahan Jagabaya II dalam perencanaan dan penyusunan program terungkap sebelum perlakuan menunjukkan angka 54,50 ternyata meningkat menjadi 60,13 setelah perlakuan. Dari data tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan para tokoh dan keluarga miskin dalam penyusunan program pengentasan keluarga miskin. Hal ini penting sekali untuk menentukan proses pelaksanaan

pengentasan keluarga miskin. Penyusunan program keluarga miskin dilakukan berdasarkan hasil keputusan warga masyarakat Kel. Jagabaya II, Kec. Sukarame.

c. Implementasi pelaksanaan program

Pengetahuan dan kemampuan tokoh masyarakat warga Kelurahan Jagabaya II dalam pengimplementasian program pengentasan keluarga miskin saat sebelum perlakuan menunjukkan angka 27,87 meningkat menjadi 32,70 setelah perlakuan. Sesuai dengan metode PRA maka pelaksanaan kegiatan pengentasan keluarga miskin diorganisir dan dipimpin oleh anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat.

d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan keluarga miskin

Pengetahuan dan kemampuan tokoh masyarakat warga Kelurahan Jagabaya II dalam mengendalikan program pengentasan keluarga miskin pada saat sebelum perlakuan menunjukkan angka 60,80 menjadi 67,27 setelah perlakuan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan warga miskin di lokasi penelitian, sudah memahami pengetahuan dan kemampuan mengadakan pemantauan atau pengawasan terhadap program kegiatan, apabila menyimpang perlu diusahakan tindakan perbaikan meluruskan kembali program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di samping itu juga pengetahuan kegiatan evaluasi yang merupakan suatu tahapan kerja, yang sudah selesai, maka hasilnya perlu dievaluasi atau dinilai sejauh mana telah mencapai tujuan program yang telah disepakati bersama

antara tokoh masyarakat dan keluarga miskin sebagai penyandang masalah sosial. Biasanya terdapat dua macam evaluasi yaitu evaluasi perkembangan program atau evaluasi pada akhir program.

Dari hasil tersebut diindikasikan bahwa para tokoh masyarakat dan keluarga miskin di Kalurahan Jagabaya II Sudah mengadopsi nilai-nilai pengentasan masalah sosial yang berbasiskan masyarakat, serta berusaha melaksanakan ide-ide tersebut tetapi kreativitas dan inisiatif mereka masih rendah akibat model pembangunan yang bersifat top-down.

Pelaksanaan penelitian efektifitas metode PRA bagi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan keluarga miskin di Propinsi Lampung mengindikasikan adanya perbedaan yang relatif signifikan pada rata-rata keberdayaan tokoh masyarakat dan keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok KSM antara sebelum dengan sesudah perlakuan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hipotesis yang menyatakan Terdapat perbedaan rata-rata tingkat keberdayaan kelompok masyarakat dalam pengentasan keluarga miskin setelah menerima perlakuan dengan melibatkan segenap potensi masyarakat pada upaya pengentasan dengan bekal pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah serta potensi kesejahteraan sosial. Hasil uji-t menunjukkan bahwa sebelum diadakan perlakuan skornya adalah 43,50 dan setelah diadakan perlakuan pengetahuan dan kemampuannya meningkat menjadi 46,17. Dari hasil tersebut nampak adanya perbedaan pengetahuan, tetapi berdasarkan hasil observasi menunjukkan meningkatnya pengetahuan tidak menjamin meningkat

pula kemampuannya. Ini tampak dari hasil kerja kelompok swadaya masyarakat yang sudah terbentuk ternyata belum mengaplikasikan prinsip PRA (*Participation Rural Appraisal*), terutama dalam pengkajian keadaan, selanjutnya untuk pengetahuan penyusunan rencana memang sudah terdapat peningkatan pengetahuan yang semula 54,50 sesudah ada perlakuan meningkat menjadi 60,13 dari hasil penelitian, tampak bahwa sudah meningkat pengetahuan untuk menyusun rencana kerja. Tetapi dari hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan para anggota kelompok untuk menyusun program masih diarahkan oleh pejabat setempat (lurah, camat dsb) kondisi tersebut mengindikasikan rendahnya kreativitas warga. Apabila dikaitkan dengan metode PRA menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan, nampaknya upaya program pemberdayaan masyarakat belum berhasil menumbuhkan partisipasi aktif keterlibatan seluruh warga, berdasarkan prinsip saling belajar menghargai perbedaan. Hal ini tampak karena masih adanya dominasi dari pejabat pembina maupun pejabat pemerintah daerah setempat.

Peningkatan pengetahuan pelaksanaan program atau implementasi program pengentasan keluarga miskin, sebelum diberikan perlakuan 27,87 kemudian sesudah diberikan perlakuan pengetahuannya meningkat 32,70. Dari hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tetapi apabila dilihat dari hasil observasi, menunjukkan rendahnya kemampuan anggota maupun pengurus KSM dalam melaksanakan program. Hal ini tampak dari pelaksanaan program yang tidak mengacu pada prinsip triangulasi yaitu

kegiatan yang berusaha mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis dengan keterlibatan bersama seluruh potensi masyarakat, upaya mengoptimalkan hasil serta orientasi praktis yakni pengembangan kegiatan.

Selanjutnya pengetahuan dalam pengendalian tampak dari hasil penelitian sebelum perlakuan nilai 60,80 kemudian setelah perlakuan 67,27. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan pengendalian. Tetapi dari hasil observasi menunjukkan masih rendahnya kemampuan kelompok swadaya masyarakat dalam melaksanakan pengendalian program berdasarkan prinsip keberlanjutan dan selang waktu. Sebab kepentingan masyarakat tidaklah tetap, oleh sebab itu perlu pembinaan lanjut yang lebih intensif. Untuk itu perlu kiranya dilaksanakan monitoring secara berlanjut untuk melihat kesesuaian dengan rencana. Dengan demikian keterlibatan PSK (Petugas Sosial Kecamatan) menjadi sangat penting artinya sebagai animator sosial, menumbuhkan motivasi masyarakat dan memfasilitasi masyarakat agar mampu melakukan pemantauan kegiatan mereka sendiri.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan para tokoh masyarakat dan keluarga miskin bukan tumbuh atas kesadaran secara mandiri dari para warga masyarakat maupun penyandang masalah, kondisi ini terjadi sebab masih rendahnya kemandirian dari para warga untuk menentukan sikap; di samping itu para warga tersebut belum memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berinisiatif menolong dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena banyaknya program pemerintah selama ini bersifat "top down." Salah satu

faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan, disebabkan karena strategi yang ditempuh bersifat sentralistik birokratik dan seragam diseluruh Indonesia. Kondisi demikian berdampak terjadinya *de empowerment* pranata sosial yang merupakan tiang kehidupan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan seyogyanya tidak bersifat seragam, sebab perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia bukanlah suatu bentuk satuan sosial yang seragam tetapi masyarakat Indonesia memiliki beberapa ragam budaya dan etnis. Seperti halnya masyarakat di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame yang berpenduduk heterogen dari berbagai macam suku bangsa dan etnis yang beragam

III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan metode PRA bagi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan keluarga miskin kurang efektif ini tampak dari data hasil penelitian mengindikasikan adanya partisipasi, namun berdasarkan hasil observasi partisipasi yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat dan keluarga miskin di Kelurahan Jagabaya II, Kec. Sukarame, Bandar Lampung bukan partisipasi murni atas kesadaran, tetapi lebih banyak karena adanya anjuran dari pejabat setempat. Situasi tersebut terjadi sebagai dampak dari model program kegiatan pembangunan yang bersifat *top down* (dari atas ke bawah) sehingga warga masyarakat mengalami *deempowerment* (proses pemudaran paranata sosial).

Pelaksanaan bimbingan sosial masyarakat dengan pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah juga atas inisiatif dari para pejabat dan instansi pembina di lokasi penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kemandirian para warga masyarakat sehingga kurang memiliki inovasi yang kreatif untuk menggali dan memanfaatkan sumber potensi di daerahnya. Di samping itu juga masih rendahnya kemampuan petugas dari instansi pembina. Petugas belum memiliki ketrampilan dan pengetahuan metode pekerjaan sosial. Terutama bimbingan sosial ke-masyarakatan dengan mengaplikasikan strategi pengembangan masyarakat (*community development*) dengan metode PRA (*participation rural appraisal*).

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan adanya pengaruh pada peningkatan pengetahuan para tokoh masyarakat dan keluarga miskin yang tergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tetapi masih sebatas pada peningkatan pengetahuan, dan belum mengarah pada kemampuan pengelolaan program berdasarkan prinsip-prinsip PRA, yaitu dengan melibatkan segenap potensi masyarakat. Hal ini terjadi karena selama 30 tahun pemerintah menjalankan program pembangunan dengan metode *top-down* sehingga masyarakat kurang mandiri dan kreatif untuk menangani masalah yang dihadapinya.

Berikut disampaikan beberapa usulan yang direkomendasikan: 1) Pengembangan sumber daya manusia sebagai petugas di lapangan yang secara aktif melaksanakan pembinaan lanjut dan memberdayakan masyarakat dengan mengaplikasikan metode PRA. Proses pengentasan keluarga miskin

dengan metode PRA perlu waktu panjang, sebab untuk mengaplikasikan metode tersebut dibutuhkan sumber daya potensi masyarakat yang kreatif dan inovatif. Untuk itu perlu proses belajar sosial bagi masyarakat. 2) Diperlukan keaktifan dari PSK (Pekerja Sosial Kecamatan) sebagai pendamping Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas pranata sosial lokal di tingkat desa agar mampu berinisiatif mengembangkan masyarakat lingkungannya.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R., 1996, *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius dan OXFAM, Yogyakarta.
- Euster, G.L., *Service to Groups* "dalam Donald Brieland, Lela B. Corstin, Charles Artherton, *Contemporary Social Work, an Introduction to Social Work and Social Welfare*, Mc. Graw Hill Book Company New York, 1995.
- Finsterbusch, K., Hotz, A.B., 1980. *Social Research for Policy Decisions*, Belmont, California, Wadsworth Publishing, Company.
- Kenny, S., 1994, *Developing Communities For The Future Development The Australia Nelson Australia Prelimited, Canberra.*
- Mantra, I.B., 1984, *Strategi Pengembangan Pedesaan*, Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan Yayasan Obor Indonesia Yogyakarta.
- Martono dan Meila. Ramadhani, 1996, *Kohesivitas Kelompok pada Masyarakat Miskin*, Laporan Penelitian, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Mulyono, I., dkk, 1996, *Berbuat Bersama Berperan setara, Acuan Penerapan Participatory Rural Apraisal, Nusa Tenggara Timur.*

- Sarjono Yatiman, 2000. Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Paradigma Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dalam Seminar Paradigma Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, 5 Februari 2000 di Jakarta
- Shadilly, H and Echal Sj M., 1987. Kamus Inggris Indonesia. PT. Gramedia
- Soetarso, 1992, Praktek Pekerjaan Sosial, Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung.
- Somjee, A.H., 1991. Development Theory, Antiques and Explorations, New York, ST Martins Press
- Wardana, N.M.W., 1995, Penelitian Evaluatif Tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Dalam Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin di Kabupaten Magelang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.
- _____, Kesejahteraan Sosial Dalam Angka, Gambaran Secara Nasional Dan Propinsi, 2001, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, Deputi Bidang Diklat Dan Litbang Kesos. Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- _____, Monografi Kelurahan Jagabaya II, Tahun 2000, Propinsi Lampung.